

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja

Kementerian PPN/Bappenas

Vol. 7 – Oktober 2023

POLICY BRIEF

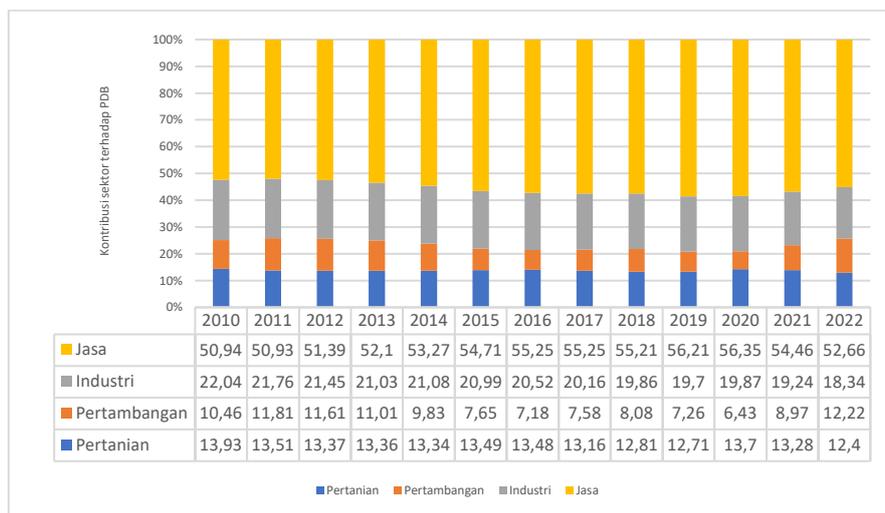


**De-Industrialisasi dan Tantangan
Kawasan Industri Prioritas**

A. Latar Belakang

Salah satu faktor dari majunya sebuah negara dapat dilihat dari pendapatan per kapita nasional dengan indikator *Gross National Income* (GNI) per kapita. Berdasarkan indikator tersebut, Indonesia berhasil menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (*upper-middle income*) di tahun 2022, menyusul Malaysia dan Thailand yang lebih dulu naik kelas. Sebelumnya, Indonesia sempat turun menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah saat pandemi. Keberhasilan Indonesia untuk menaikkan kelas pendapatannya disebabkan oleh keberhasilan pemulihan konsumsi masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran, serta didorong dengan ekspor komoditas pada tahun 2022.¹ Saat ini, Indonesia berjuang untuk 'naik kelas' menjadi negara berpendapatan tinggi.

Melihat pada praktik baik negara maju di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, industrialisasi menjadi kunci penting untuk mendorong keduanya menjadi negara berpendapatan tinggi. Sementara itu, alih-alih bergerak menyusul Jepang dan Korea Selatan, beberapa tahun belakangan Indonesia justru mengalami penurunan kontribusi sektor industri pengolahan pada angka PDB nasional, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah. Pada tahun 2022, kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 18,34%, turun 3,7% dibandingkan tahun 2010 dengan tren hampir konsisten menurun. Kondisi ini marak disebut sebagai de-industrialisasi dini.



Gambar 1. Distribusi PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022²

Sementara itu, sektor jasa kembali mengalami penurunan *share* dimulai dari pandemi setelah satu mengalami peningkatan pada tren di dekade sebelumnya. Justru, sektor yang mengalami kenaikan setelah pandemi adalah sektor pertambangan. Melonjaknya sektor pertambangan dan penurunan konsisten sektor industri menggambarkan bahwa hasil pertambangan tidak diolah lagi di sektor industri, akan tetapi dijual dalam bentuk komoditas sehingga hilirisasi yang menciptakan nilai tambah perekonomian masih belum banyak terjadi. Meskipun Indonesia memiliki banyak Kawasan Industri yang tersebar tidak hanya di Pulau Jawa, akan tetapi seperti yang telah dijelaskan grafik di atas, penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Industri yang ada perlu dimaksimalkan dan difokuskan prioritasnya agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar secara agregat dan pada akhirnya menghentikan laju de-industrialisasi.

¹ The World by Income, World Bank (2023)

² Badan Pusat Statistik (2023)

B. Profil Major Project Kawasan Industri Prioritas

Pada RPJMN 2020-2024, telah dicanangkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) 9 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa dan 31 Smelter. *Major project* ini bertujuan untuk mencapai industrialisasi di luar Pulau Jawa yang mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi luar Jawa. Pada RKP 2024, *major project* tersebut kian disempurnakan dengan lokus sebanyak 11 KI serta indikator keberhasilan, yakni: (1) pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,4-6%; (2) kontribusi sektor industri pengolahan pada PDB sebesar 20,6%; (3) realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp.483,9 Triliun di tahun 2023; (4) peningkatan jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,7 juta orang di tahun 2023.³

Beberapa KI yang disebut dalam RPJMN dan menjadi lokus MP Kawasan Industri dan Smelter saat ini telah beroperasi, seperti KI/KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara dan KI Surya Borneo di Kalimantan Timur dengan fokus industri kelapa sawit, KI Ketapang dengan *anchor tenant* smelter bauksit, KI/KEK Palu dengan *anchor tenant* smelter nikel dan pengolahan kelapa, dan KI Teluk Weda dengan *anchor tenant* smelter nikel. Sementara, beberapa KI lain berstatus sudah siap secara infrastruktur utama (kategori operasional) tetapi belum beroperasi dikarenakan belum adanya tenant yang masuk, seperti KI Tenayan atau sudah ada *tenant* namun masih dalam tahap konstruksi seperti KI Sadai. Sisanya belum masuk kategori operasional karena terkendala beberapa masalah. Masalah yang paling sering ditemukan adalah belum terbitnya izin karena terkendala pembebasan/perluasan lahan.

No ⁴	KI	Provinsi	Kelompok	Status RPJMN	Kategori	Pengelola	Perencanaan			Tata Ruang	Status Lahan	Perizinan	Infrastruktur Dalam Kawasan	Infrastruktur Luar Kawasan		
							MP	FS	Dokling					Konektivitas	Sumber Air Baku	Jaringan Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Sei Mangkei	Sumut	RPJMN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
2	Tenayan	Riau	RPJMN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
3	Galang Batang	Kep. Riau	RPJMN	Prioritas	Berkembang	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
4	Bintan Aerospace	Kep. Riau	RPJMN	Prioritas	Berkembang	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
5	Sadai	Kep. Babel	RPJMN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2
6	Subang	Jawa Barat	PSN	Prioritas	Potensial	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Batang	Jateng	PSN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2
8	Surya Borneo	Kalteng	RPJMN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
9	Tanah Kuning	Kaltara	RPJMN & PSN	Prioritas	Potensial	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
10	Ketapang	Kalbar	RPJMN & PSN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
11	Takalar	Sulse	RPJMN & PSN	Prioritas	Potensial	3	3	3	3	2	2	2	1	2	1	1
12	Palu	Sulteng	RPJMN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
13	Teluk Weda	Malut	RPJMN & PSN	Prioritas	Operasional	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3

Keterangan untuk kolom (7) s/d kolom (17)	Belum ada (1)
	Proses (2)
	Ada (3)

Beroperasi

Tabel 1. Kesiapan 13 Kawasan Industri Prioritas⁴

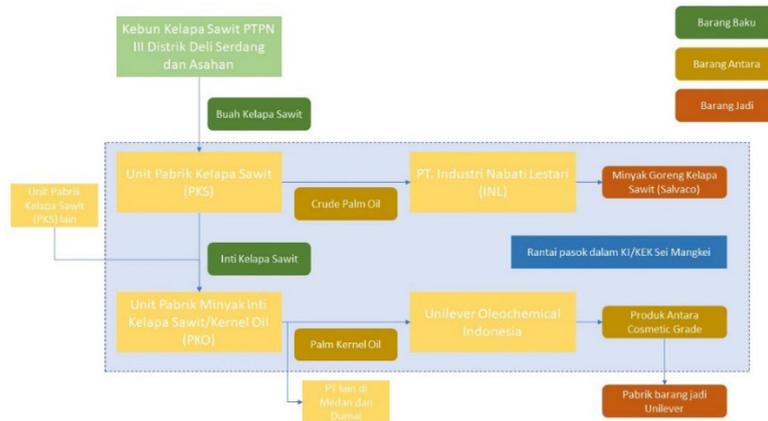
Apabila dilihat dari Tabel 1 di atas, sebagian besar KI sudah masuk dalam tahap siap untuk beroperasi karena sebagian besar KI sudah memenuhi persyaratan dalam kesiapan dokumen perencanaan. Kesiapan yang belum dipenuhi sebagian besar KI adalah kesiapan infrastruktur, baik infrastruktur dalam maupun luar kawasan, terutama konektivitas dari dan menuju KI. KI yang paling baik dalam segi kesiapan, yakni KI Sei Mangkei dan KI Surya Borneo, masih terkendala masalah konektivitas yang masih dalam proses pemenuhan walaupun keduanya sudah beroperasi dan memiliki *tenant*. Sementara, KI yang paling jauh dari kesiapan adalah KI Tanah Kuning dan KI Takalar.

³ Perpres no. 108 Tahun 2022 mengenai RKP 2023

⁴ Hasil Monev Triwulan II Tahun 2023 Direktorat IPEK Bappenas

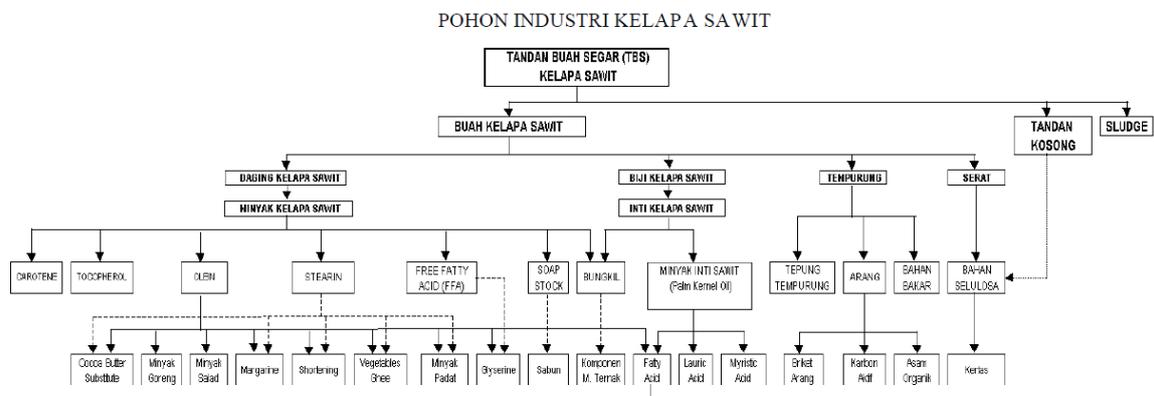
C. Profil KI/KEK Sei Mangkei

Salah satu KI RPJMN yang sudah berkinerja cukup baik adalah KI/KEK Sei Mangkei yang terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sei Mangkei menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertama di Indonesia dan beroperasi sejak tahun 2015 yang dibangun di tengah perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nasional (PTPN) III dan dikelola oleh PT. Kawasan Industri Nusantara (KINRA), anak perusahaan dari PTPN III. Sei Mangkei kini telah memiliki 18 *tenant* dan mayoritas dari *tenant* tersebut memiliki fokus industri kelapa sawit dan membentuk rantai pasok tersendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan kawasan industri yang memang ingin membangun konsep *integrated value chain* seperti yang dijelaskan oleh Gambar 2 di bawah.



Gambar 2. Alur Hilirisasi Kelapa Sawit di KEK Sei Mangkei⁵

Tenant terbesar sekaligus *anchor tenant* di KI Sei Mangkei adalah PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) yang menghasilkan beberapa produk antara/setengah jadi seperti *fatty acid*, *surfactant*, *glycerin*, dan *soap noodle* yang didapatkan dari pengolahan minyak inti kelapa sawit/*palm kernel oil* dengan kategori *cosmetic grade*. Adapun *tenant* lain adalah PT Industri Nabati Lestari (INL), anak perusahaan gabungan PTPN III dan PTPN IV, yang bahkan sudah menghasilkan produk jadi seperti minyak goreng dengan brand Salvaco yang mengolah minyak kelapa sawit/*crude palm oil*. Keduanya mendapatkan input daging dan inti kelapa sawit dari pabrik unit PKS dan PKO milik PTPN III. Semua transaksi antar perusahaan di dalam lingkup area KEK Sei Mangkei tidak dikenakan pajak. Apabila melihat pada pohon industri kelapa sawit di Gambar 3, pengolahan industri kelapa sawit di KEK Sei Mangkei setidaknya telah menghasilkan produk hilirisasi level 2 hingga barang jadi.



Gambar 3. Pohon Industri Kelapa Sawit⁶

⁵ Monev Major Project Kawasan Industri Prioritas ke KEK Sei Mangkei Agustus 2023

⁶ Diolah dari Berbagai Sumber

Saat ini, KEK Sei Mangkei masih memiliki fokus mengundang *tenant* sebanyak-banyaknya ke dalam kawasan walaupun pada rencana zonasinya terdapat beberapa zonasi industri selain kelapa sawit seperti karet, elektronik, aneka industri, hingga zona untuk industri kecil dan menengah (IKM). Apabila okupansi sudah mencapai 50%, akan dilakukan evaluasi *masterplan* untuk menyesuaikan arah pengembangan kawasan industri dan mengubah fokus untuk mengundang industri-industri komplementer/pelengkap dari *tenant-tenant* yang sudah ada.

Seperti telah disebutkan pada Tabel 1, konektivitas masih menjadi salah satu isu dalam perkembangan KEK Sei Mangkei. *Dryport* dan rel kereta api sebagai sarana transportasi logistik di Sei Mangkei belum beroperasi karena belum terbitnya izin. Padahal, *dryport* dan rel kereta ini telah tersambung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung yang berjarak kurang lebih 40 kilometer dan juga tersambung dengan Kota Medan. Selain rel kereta api, telah dicanangkan juga pembangunan *exit* tol Lima Puluh sebagai *exit* tol terdekat dari KEK Sei Mangkei yang terdapat pada jalur Tol Medan – Asahan yang pembangunannya sedang dilaksanakan. Namun, *exit* tol ini tidak langsung terhubung ke dalam KEK Sei Mangkei, melainkan ke Jalan Batu Bara – Simalungun yang berjarak 5 kilometer dari pintu masuk KEK Sei Mangkei. Lebar Jalan Batu Bara – Simalungun kurang layak untuk jalan yang akan banyak dilalui kendaraan besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan setiap harinya. Penyambungan langsung Tol Medan – Asahan ke dalam KEK Sei Mangkei terkendala oleh tidak keluarnya izin dari pemerintah daerah. Tol ini sangat penting apabila nantinya beroperasi karena sebagian besar barang masih dikirim ke Pelabuhan Belawan di Kota Medan, diakibatkan belum ramainya Pelabuhan Kuala Tanjung. Selain isu konektivitas, adanya KI Kuala Tanjung di samping Pelabuhan Kuala Tanjung yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dioperasikan oleh PT Pelindo juga membuat adanya potensi persaingan antar dua kawasan industri. Apalagi, KI Kuala Tanjung juga terletak persis di Pelabuhan Kuala Tanjung sehingga dari segi lokasi akan lebih strategis secara konektivitas laut.

D. Analisis

Adanya masalah-masalah di atas, baik untuk KI Prioritas dalam MP Kawasan Industri dan Smelter secara umum maupun KI/KEK Sei Mangkei secara khusus, menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk membangun kawasan industri yang lebih efisien. Mulai dari penentuan lokasi kawasan industri di awal, faktor-faktor yang dapat menaikkan efisiensi kawasan industri dan lebih menarik *tenant*, serta pada akhirnya memperlambat hingga mencegah laju deindustrialisasi.

Penentuan lokasi industri paling sederhana dijelaskan oleh teori lokasi manufaktur yang dikemukakan Alfred Weber pada awal abad 20. Teori ini menjelaskan penentuan letak lokasi produksi dengan mempertimbangkan jarak dari sumber bahan baku dan pasar, berat bahan baku dan barang yang sudah diolah, serta biaya transportasi barang yang disimplifikasi dengan mengalikan biaya per satuan berat dan jarak.⁷ Apabila berat bahan baku lebih berat dari barang yang sudah diolah, akan lebih efisien untuk mendekatkan lokasi produksi dengan sumber bahan baku karena biaya transportasi yang dikeluarkan akan lebih kecil. Berdasarkan teori ini, industri bisa dibedakan dua, yakni industri berbasis bahan baku dan industri berbasis pasar.

Teori penentuan lokasi industri terus berkembang seiring zaman. Model penentuan lokasi industri terus dikembangkan dengan melihat adanya beberapa aspek seperti aglomerasi industri atau pembentukan kluster industri tertentu (biasanya melihat pembentukan rantai pasok/nilai), perkembangan komponen penyusun biaya transportasi, serta penentuan lokasi industri dengan

⁷ Hanink, D. M. (2017). Industrial Location Theory. International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology, 1–11.

melihat faktor lingkungan, baik alam, bangunan, bisnis, sumber daya manusia, birokrasi dan sebagainya.⁸ Faktor-faktor tersebut akan menjadi pertimbangan untuk *tenant*/calon investor dalam menempatkan bisnis atau pabriknya di suatu tempat. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan hal-hal di atas untuk menempatkan kawasan industri terutama KI Prioritas.

Setiap KI Prioritas dapat dikelompokkan menjadi KI berbasis bahan baku dan KI berbasis pasar sehingga memudahkan pemetaan prioritas penanganan untuk setiap KI. KI berbasis bahan baku seperti Sei Mangkei (kelapa sawit), Teluk Weda (nikel), dan Ketapang (bauksit) telah memiliki akses yang baik dengan bahan baku sehingga yang perlu dilakukan adalah peningkatan konektivitas ke pasar, baik darat (dengan jalan nasional/provinsi dan rel kereta api), laut/sungai (pelabuhan/dermaga), serta bandar udara, seperti halnya dengan isu yang muncul pada KEK Sei Mangkei.

Sementara, KI yang tidak memiliki fokus industri tertentu dan dekat dengan kota besar/ibukota provinsi dapat dikelompokkan menjadi KI berbasis pasar. KI yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori ini, antara lain Tenayan (Pekanbaru), Subang, Batang, Palu dan Takalar (Makassar). Selain konektivitas ke pasar yang lebih baik, yang berarti memiliki lingkungan bisnis lebih baik juga, KI ini memiliki keunggulan dari sisi SDM yang lebih terbangun. Daerah perkotaan biasanya memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik sehingga mempunyai kumpulan SDM yang lebih baik pula. Faktor SDM merupakan kunci penting dari masuknya investor. Hal ini merujuk pada contoh kasus meningkatnya industri Vietnam yang begitu cepat pasca pandemi Covid-19 dikarenakan melimpahnya *supply* tenaga kerja terampil untuk bidang industri apabila dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.⁹

KI Prioritas berbasis pasar di luar pulau Jawa, seperti Tenayan dan Takalar, dapat menjadi “*powerhouse*” rantai pasok regional yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian di daerah atau pulau tempat KI tersebut berada. Apalagi, masih terdapat beberapa isu seperti mahalnya harga barang di luar Jawa ketimbang di Jawa. Berbagai KI tersebut dapat diarahkan untuk mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga biaya transportasi barang jadi menjadi lebih murah karena lebih dekat dengan pasar, yang secara langsung dapat menurunkan harga barang menjadi lebih terjangkau. Selama ini, beberapa provinsi di luar Jawa juga mempunyai daya serap dan daya sebar yang tinggi sehingga dapat menciptakan multiplier yang baik bagi perekonomian nasional. Beberapa provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, beberapa KI Prioritas RPJMN yang ada di beberapa provinsi tersebut bisa lebih diprioritaskan seperti Sei Mangkei, Ketapang, dan Surya Borneo.¹⁰

Terdapat beberapa MP berbasis pembangunan kewilayahan (Prioritas Nasional 2) yang dapat diintegrasikan pembangunannya dengan KI Prioritas RPJMN seperti MP Pembangunan Wilayah Metropolitan dan MP Pembangunan Kota Baru. Salah satu Wilayah Metropolitan, yakni Makassar dapat didukung oleh KI Takalar karena Kabupaten Takalar juga masuk ke dalam pembangunan metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Hal ini dapat diperkuat kembali oleh arah pembangunan Pulau Sulawesi menjadi daerah penyangga IKN sehingga KI Takalar dan KI Palu mempunyai posisi penting untuk peningkatan laju perekonomian di Selat Makassar. Hubungan antara KI dan kota metropolitan yang baik dapat mencontoh kawasan industri di Cikarang-Karawang, terutama KI Jababeka, dengan Metropolitan Jabodetabek.

⁸ Mccann, P., & Sheppard, S. (2003). The Rise, Fall and Rise Again of Industrial Location Theory. *Regional Studies*, 37(6-7), 649–663.

⁹ Rajiv Biswas. (13 Apr 2003) Vietnam Economy Moderates in Early 2023. S&P Global Market Intelligent. Economics Commentary

¹⁰ Hasil exercise Peneliti INDEF, dipaparkan pada Diskusi MP KI Prioritas PAKK 11 Juli 2023

Dua KI lain juga dapat menyangga pembangunan kota baru yang termasuk ke dalam MP Pembangunan Kota Baru di luar Pulau Jawa, yakni KI Tanah Kuning dengan kota Tanjung Selor untuk pengembangan wilayah Kalimantan Utara sebagai provinsi baru sekaligus penyangga IKN dan KI Teluk Weda dengan kota Sofifi dalam konteks pembangunan Pulau Halmahera. Kedua kota tersebut mempunyai kesamaan, yakni ibukota provinsi yang tidak menyanggah status sebagai kota otonom walaupun Sofifi masuk dalam Kota Tidore Kepulauan.

Adanya konektivitas yang baik sebenarnya dapat membuat beberapa KI dapat menjadi KI berbasis bahan baku yang dekat dengan pasar, seperti Sei Mangkei yang dapat dihubungkan dengan beberapa KI di dekat Medan dengan tol dan kereta api. Hal ini dapat dijadikan *best practice* oleh KI Surya Borneo di Pangkalan Bun yang dapat dihubungkan dengan Palangkaraya bahkan wilayah metropolitan Banjarbakula. Pemerintah, khususnya lewat Bappenas dan MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, harus mempertimbangkan KI lain yang masuk dalam KI Prioritas dan melakukan pengelompokan KI sesuai dengan fungsinya. Apakah untuk hilirisasi, penyangga metropolitan, dan sebagainya serta tidak menambah fokus prioritas setiap tahunnya karena keterbatasan anggaran yang ada. Hal ini juga berlaku untuk KI PSN sehingga tidak ada KI yang berpotensi inefisien seperti Sei Mangkei dan Kuala Tanjung yang sudah dijelaskan.

Selain fungsi KI bagi berjalannya rantai pasok dan hubungannya dengan wilayah sekitar, perlu diperhatikan bahwa KI tersebut memang berjalan sesuai peruntukannya, yakni mencegah laju deindustrialisasi. Bagi sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, semestinya dilakukan hilirisasi sehingga menaikkan nilai tambah. Oleh karena itu, posisi KI untuk mengubah komoditas sangatlah sentral. Kemudian, KI seharusnya tidak mengedepankan *tenant-tenant* yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa lainnya, seperti pergudangan, sehingga di lahan-lahan KI sebagian besar memang diperuntukkan bagi pabrik-pabrik pengolahan yang memang akan menaikkan sektor industri pengolahan.

E. Rekomendasi

Dari analisis di atas, dapat disarikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, khususnya untuk Kawasan Industri, sebagai berikut:

- a. **Perlu dibuat prioritisasi ulang Kawasan Industri**, terutama yang masih dalam tahap berkembang dan terkendala izin atau hak pengelolaan atas tanah. Alih-alih menambah jumlah KI Prioritas setiap tahunnya di dalam RKP, KI Prioritas perlu diperjelas fungsinya. Apakah untuk melakukan hilirisasi suatu komoditas perkebunan atau tambang (bisa dilakukan juga pembagian strata seperti terdapat industri primer dan sekunder), atau mendukung kawasan metropolitan tertentu, atau untuk mendukung KI lain, dan sebagainya. Hal ini berlaku, terutama untuk Kawasan Industri di luar Pulau Jawa yang dekat dengan kawasan metropolitan dapat dijadikan hub untuk melakukan pengolahan barang menjadi barang setengah jadi sehingga mendorong pemerataan harga di luar Jawa serta bisa terhubung dengan metropolitan lewat *super corridor*. Untuk prioritisasi KI di luar Jawa bisa mempertimbangkan daya sebar dan daya serap untuk mengoptimalkan perekonomian nasional;
- b. **Perlu dibuat keterpaduan antara MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dengan MP kewilayahan** (Prioritas Nasional 2) seperti MP Wilayah Metropolitan Luar Jawa dan MP Pengembangan Kota Baru;
- c. **Perlu dilakukan pengawasan berkala terhadap pengelola Kawasan Industri untuk mengedepankan pabrik-pabrik pengolahan** yang menjadi tenant di Kawasan Industri

- sehingga menaikkan nilai tambah dan mendorong kontribusi sektor industri pengolahan dan tidak mendahulukan sektor lain seperti perdagangan/peredagangan yang berkembang pesat;
- d. **Perkuat SDM berwawasan industri dengan merealisasikan SMK khusus di sekitar KI melalui MP Pendidikan Vokasi untuk Industri 4.0**, khususnya untuk KI berbasis komoditas untuk hilirisasi untuk menciptakan *link and match* antara lulusan dengan industri;
 - e. **Perjelas koordinasi strategis antar Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Kawasan Industri**, tidak hanya untuk KI Prioritas RPJMN, namun juga KI PSN agar terjadi harmonisasi pengembangan industri khususnya di luar Jawa.

Disusun oleh:

Ridwan Renaldi, S.E.

ridwan.renaldi@support.bappenas.go.id

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK)

pak@bappenas.go.id

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi tautan di bawah ini:

<https://bit.ly/KuesionerBrief7PAKK>